



Memahami Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat se-Jawa dan Bali

Perkuat Semangat Gotong Royong dan Upaya Strategis Sektor Ekonomi

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat se-Jawa dan Bali perlu kita dukung bersama. Tujuannya agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan. Upaya ini patut dipahami dan dilaksanakan bersama.

Oleh:

Susanto Dwi Antoro

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Jogja

MESKI belum ada varian baru, mudah-mudahan tidak ada, tapi banyak kemantren (kecamatan, Red) di Kota Jogja berstatus merah. Atau zona risiko tinggi.

PPKM Darurat bakal berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang mulai bangkit. Saat bersamaan harus dilakukan pengetatan. Menyusul merebaknya kasus-kasus di masyarakat yang terinfeksi virus korona.

Kesadaran masyarakat saja tidaklah cukup. Harus dibarengi langkah nyata. Ada upaya strategis mendukung sektor-sektor ekonomi masyarakat.

► Baca Perkuat... Hal 7

Sambungan dari hal 1

Terutama pedagang kecil, pekerja informal dan lainnya. Pemerintah Kota Jogja telah memiliki upaya-upaya strategis tersebut. Misalnya dengan penyesuaian jam operasional sejumlah tempat usaha.

Kemudian ada kebijakan di sektor pariwisata. Upaya tersebut sebaiknya dibarengi dengan pemberian informasi yang lengkap ke publik. Bagaimana tata kalanya dan seterusnya.

Hal ini agar masyarakat tidak kebingungan dengan pemberlakuan PPKM Darurat ini.

Selain itu, perlu dipikirkan

beberapa hal. Pertama, soal penambahan insentif bagi tenaga kesehatan. Sebab, mereka garda depan penanganan Covid-19 yang harus diperhatikan.

Kedua, penambahan insentif dan personel Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas melakukan penguburan jenazah. Hampir setiap hari tanpa libur mereka menjalankan tugas.

Ketiga, penguatan secara operasional maupun anggaran untuk Satgas Covid-19 di Wilayah RT, RW, Kelurahan dan Kemantren se-Kota Jogja.

Keempat, memberikan ekstra vitamin dan gizi seimbang kepada

anggota kepolisian, TNI, Satpol PP, Kamtib Pasar dan Jogoboro. Ini demi penguatan imun serta stamina di masa PPKM Darurat. Tugas yang mereka emban sangat berat. Kelima, pemberlakuan disiplin standar operasional prosedur (SOP) yang ketat untuk sektor pariwisata dan ekonomi hingga pukul 20.00.

Selanjutnya, memberikan edukasi ke masyarakat. Jangan tiba-tiba ada sanksi karena dianggap melanggar aturan. Tanpa dibarengi informasi yang lengkap. Termasuk hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat.

Keenam, vaksin untuk anak berumur 12 tahun segera dapat

diterapkan. Ketujuh, hal terpenting di masa PPKM Darurat adalah penguatan semangat gotong royong. Baik dalam masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah.

Gotong royong semua elemen bangsa sangat diperlukan. Khususnya membantu masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Atau segala kesulitan lainnya yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan PPKM Darurat ini. (*)

*) Penulis juga menjabat ketua Gugus Tugas Lawan Covid-19 DPC PDI Perjuangan Kota Jogja.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005